

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Studi

Rencana Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang menjelaskan mengenai pengembangan sumberdaya air di Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang tahap pertama (1969-1993), sektor pengembangan sumberdaya air telah mencapai hasil yang luar biasa dengan sasaran keseluruhan yakni tercapainya swasembada beras, yang merupakan kebutuhan pangan pokok di Indonesia. Rencana pengembangan sumber daya air tahap kedua (1994-2019) lebih terarah kepada peningkatan kapasitas pasokan sumberdaya air untuk memenuhi permintaan rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata dan hydropower, dan untuk mempromosikan pengalokasian air secara efektif.

Rencana Pembangunan Lima Tahun tahap Keenam (REPELITA-VI, 1994-98), merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang, yang telah menargetkan pasokan air secara kuantitatif. Untuk mencapai target tersebut, promosi secara nasional dan provinsi dianggap sebagai sektor utama yang merupakan peningkatan efisiensi dan produktivitas atas tata guna air, peningkatan volume pasokan, perluasan jaringan irigasi, perbaikan tata guna air dengan mengefisienkan sistem distribusi air, pengurangan dampak lingkungan, penguatan lembaga/institusi sumberdaya air, dan mendukung pembangunan sumberdaya air regional.

Setelah krisis moneter tahun 1997, Pemerintah Indonesia mengumumkan pada bulan Oktober 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk lima tahun-an dari 1999-2004. Sejalan dengan arahan global yang tertuang dalam GBHN, Program Pembangunan Nasional Lima tahunan (PROPENAS) 2000-2004 dipersiapkan di bulan Agustus tahun 2000. PROPENAS memfokuskan pada dua landasan permasalahan ekonomi; yaitu, globalisasi dan desentralisasi. Undang-undang No. 22, 1999 (Undang-undang Otonomi Daerah) dan Peraturan Pemerintah No. 25, 1999 (Keseimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah) yang sudah ditetapkan pada saat ini, dengan demikian Indonesia mengambil langkah yang besar yakni Desentralisasi..

Berdasarkan latar belakang nasional ini, pengelolaan sumber daya air ini dialihkan dari “prakarsa propinsi dan nasional” ke “prakarsa kerjasama air kabupaten-kota,.” Lebih jauh lagi, dengan suatu pemikiran bahwa pengelolaan daerah aliran sungai harus dibina dengan menggunakan konsep “satu daerah aliran sungai, satu rencana dan satu pengelolaan” restrukturisasi organisasi untuk menyatukan pengelolaan daerah aliran sungai dianggap sebagai suatu unsur yang sangat penting. Desentralisasi mengharuskan staf pemerintah daerah mampu mengurus aktivitas daerahnya masing-masing, sehingga, pengembangan kapasitas binaan bagi staf pemerintah daerah sangat diperlukan.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi terletak di bagian selatan Pulau Sumatra. Sebagian besar DAS Musi berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Panjang keseluruhan wilayah aliran sungai Musi kira-kira 640 km dan total daerah tangkapan kira-kira 60.000

km². Daerah aliran tersebut memiliki beraneka ragam permasalahan, tetapi belum ada pengelolaan air yang memadai. Wilayah hutan di daerah hulu mengalami penurunan yang drastis karena adanya aktivitas manusia saat ini, hasilnya yaitu penurunan kapasitas retensi air. Pembangunan infrastruktur untuk perluasan produksi pangan ditekankan pada wilayah tengah sebagai bagian dari rencana nasional dan pada daerah rawa di wilayah hilir yang merupakan zona pembangunan strategis Propinsi Sumatera Selatan, dengan demikian sudah selayaknyalah dikatakan bahwa alokasi air di daerah aliran sungai merupakan permasalahan utama. Di wilayah hilir, sedimen dihasilkan dari pengikisan daerah hulu yang mengendap di alur/kanal sungai, dan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru termasuk penyumbatan muara sungai, penurunan wilayah aliran, dan sebagainya.

Sejalan dengan proses desentralisasi di Indonesia, Propinsi Sumatra Selatan dan masing-masing kabupaten dan kota diminta menyusun Rencana Induk di berbagai bidang untuk mempromosikan pembangunan regional. Karena itu, penetapan rencana induk pengelolaan air secara komprehensif pada daerah aliran sungai Musi dinilai sangat mendesak untuk dilakukan.

Dengan latar belakang inilah Pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan usulan kerjasama dengan Pemerintah Jepang, dalam pelaksanaan studi ini. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen KIMPRASWIL dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) telah mengadakan kontrak kerjasama pada 25 Januari 2002. Selanjutnya, JICA menetapkan suatu konsorsium konsultan yang terdiri dari ; *CTI Engineering International Co., Ltd.* dan *Nikken Consultants Inc.*, yang kemudian mengirimkan suatu Study Team ke Indonesia untuk melaksanakan studi ini.

1.2 Tujuan Studi

Adapun tujuan dari studi ini, yakni:

- (1) Untuk mempersiapkan rencana induk pengelolaan air secara komprehensif pada Daerah Aliran Sungai Musi.
- (2) Untuk mengadakan kegiatan alih teknologi kepada pihak counterpart yang terlibat dalam Studi.

1.3 Wilayah Studi

Wilayah studi yang dipilih yaitu Daerah Aliran Sungai Musi yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatra, Indonesia (lihat Peta Lokasi).

1.4 Bagan Studi

Bagan keseluruhan studi disajikan dalam **Gambar 1.4.1**.

Kegiatan	2002						2003									
	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	
Pekerjaan di Indonesia		Pertama					Kedua					Ketiga				
Pekerjaan di Jepang	Persiapan □				Pertama □						Kedua □			Ketiga □		
Pelaporan		▲ IC/R			▲ PR/R			▲ IT/R					▲ DF/R		▲ F/R	
Rapat Panitia Pengarah		▲ IC/R		▲ Kemajuan awal		▲ PR/R			▲ IT/R				▲ DF/R			
Konsultasi Publik			★ Pre P/C		★ P/C (1)			★ P/C (2)								
Seminar													★ Seminar			

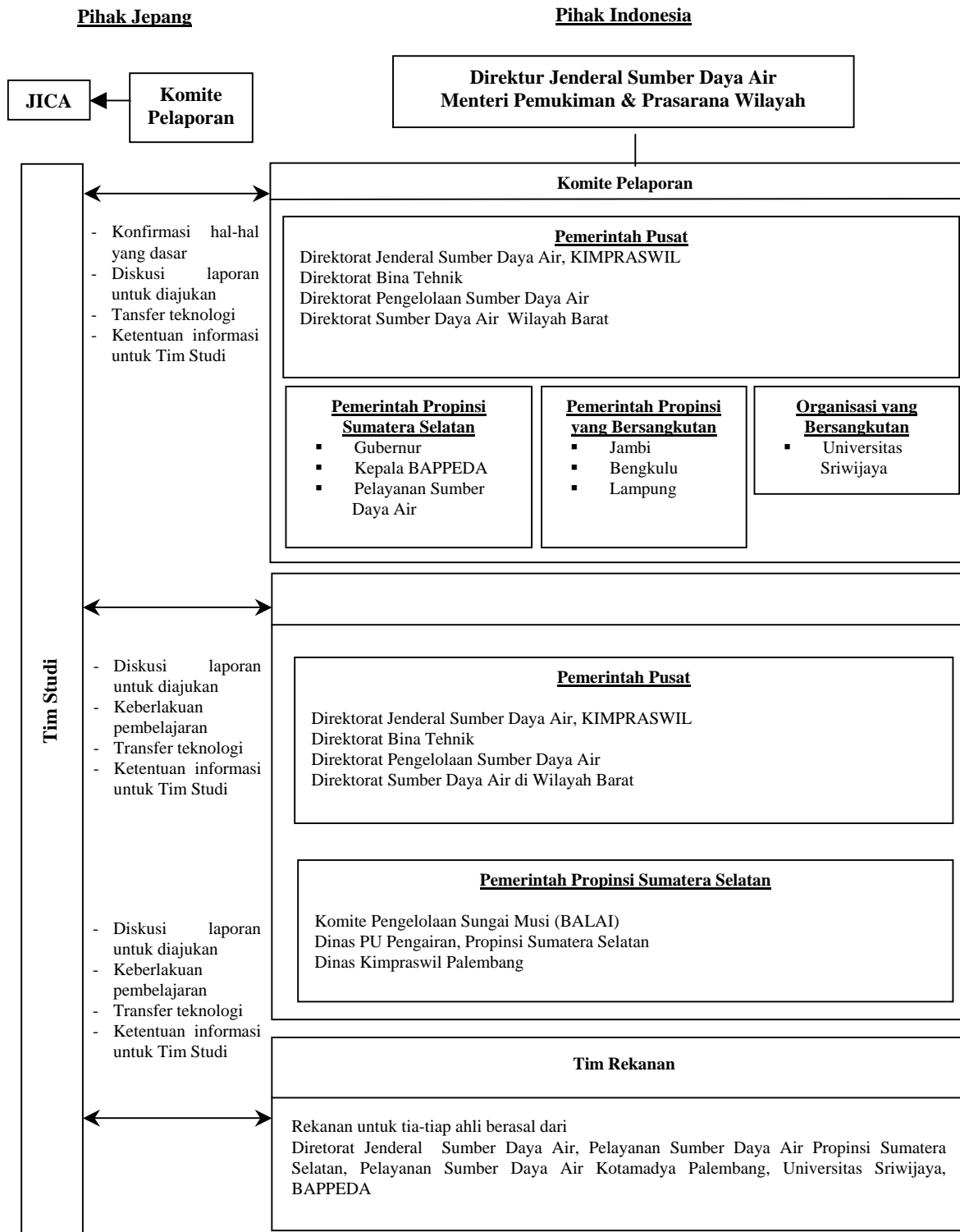
Keterangan: IC/R: Laporan Insepsi PR/R: Laporan Kemajuan IT/R: Laporan Sementara
 DF/R: Draft Laporan Akhir F/R: Laporan Akhir P/C: Konsultasi Publik

Gambar 1.4.1 Bagan Studi Keseluruhan

1.5 Organisasi Pelaksanaan Studi

Gambar 1.5.1 menyajikan struktur organisasi dalam pelaksanaan studi. Fungsi dari Panitia penasehat JICA adalah untuk memberikan konsultasi/nasehat yang dianggap penting dalam Studi kepada JICA.

Anggota panitia pengarah, Tim Koordinasi/Supervisi, Tim Counterpart dari Pemerintah Indonesia, dan Panitia Penasehat JICA dan Study Team disajikan dalam **Lampiran 1.5.1**.



Catatan : Kimpraswil adalah singkatan dari Pemukiman dan Prasarana Wilayah

Gambar 1.5.1 Organisasi Studi